

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kota Manado

Jericho Danga Pombengi<sup>1</sup>, Joyce Jacinta Rares<sup>2</sup>, Stevania Sajow<sup>3</sup>, Fibrianti Kaparang<sup>4</sup>,  
Suci A. Tamrin<sup>5</sup>, Yulinda Tinungki<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sam Ratulangi

<sup>1</sup>[richo\\_pombengi@unsrat.ac.id](mailto:richo_pombengi@unsrat.ac.id), <sup>2</sup>[joy.rares09@gmail.com](mailto:joy.rares09@gmail.com), <sup>3</sup>[sajowstevania@gmail.com](mailto:sajowstevania@gmail.com)

Corresponding author: [sajowstevania@gmail.com](mailto:sajowstevania@gmail.com)

Submitted: 29/04/2026; Revised: 04/06/2026; Published: 01/07/2026

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v9i2.484>

### Abstract

*This research seeks to assess how urban waste management regulations are being executed in Manado City. Due to the swift rise in population, urban development, and growing economic activities, waste management has emerged as a critical concern in city governance, leading to increased waste production. A descriptive qualitative methodology is utilized in this study, drawing on secondary data sourced from government publications, statistical data, policy papers, and pertinent academic research. The evaluation uses George C. Edward III's framework for policy implementation, emphasizing aspects such as communication, available resources, readiness, and organizational setup. Results show that the execution of waste management strategies in Manado City has not yet reached optimal levels. The city produces roughly 300 to 330 tons of waste daily, which puts considerable strain on the waste management system, particularly affecting the Sumompo landfill. Several key challenges have been noted, including insufficient infrastructure, a lack of skilled human resources, poor coordination among agencies, minimal community involvement, and low application of waste processing technologies. Additionally, this study highlights that issues related to waste management extend beyond technical challenges, also encompassing institutional capabilities and community attitudes. Consequently, enhancing communication efforts, improving resource oversight, bolstering inter-agency collaboration, increasing public involvement, and advocating for sustainable waste management approaches are vital for boosting the effectiveness of urban waste management strategies in Manado City.*

**Keywords:** Policy Implementation, Waste Management, Manado City, Edward III Model, Public Administration

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana peraturan pengelolaan sampah perkotaan diterapkan di Kota Manado. Karena pesatnya pertumbuhan penduduk, pembangunan perkotaan, dan aktivitas ekonomi yang meningkat, pengelolaan sampah telah menjadi perhatian penting dalam tata kelola kota, yang menyebabkan peningkatan produksi sampah. Metodologi kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari publikasi pemerintah, data statistik, makalah kebijakan, dan penelitian akademis yang relevan. Evaluasi menggunakan kerangka kerja implementasi kebijakan George C. Edward III, yang menekankan aspek-aspek seperti komunikasi, sumber daya yang tersedia, kesiapan, dan pengaturan organisasi. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi pengelolaan sampah di Kota Manado belum mencapai tingkat optimal. Kota ini menghasilkan sekitar 300 hingga 330 ton sampah setiap hari, yang memberikan tekanan yang cukup besar pada sistem pengelolaan sampah,

khususnya memengaruhi tempat pembuangan sampah Sumompo. Beberapa tantangan utama telah dicatat, termasuk infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, koordinasi yang buruk antar lembaga, keterlibatan masyarakat yang minimal, dan penerapan teknologi pengolahan sampah yang rendah. Selain itu, penelitian ini menyoroti bahwa isu-isu terkait pengelolaan sampah meluas melampaui tantangan teknis, juga mencakup kemampuan kelembagaan dan sikap masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan upaya komunikasi, memperbaiki pengawasan sumber daya, memperkuat kolaborasi antar lembaga, meningkatkan keterlibatan publik, dan mengadvokasi pendekatan pengelolaan sampah berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas strategi pengelolaan sampah perkotaan di Kota Manado.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Kota Manado, Model Edward III, Administrasi Publik

## Pendahuluan

Pengelolaan sampah menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama di kawasan perkotaan. Lonjakan jumlah penduduk yang cepat, berkembangnya aktivitas ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan volume sampah terus bertambah dari masa ke masa. Situasi ini tidak hanya memengaruhi lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan mutu tata kelola kota. Karenanya, pengelolaan sampah merupakan isu strategis dalam administrasi publik yang memerlukan kebijakan efektif, efisien, dan berkelanjutan (Guerrero, Maas, & Hogland, 2013).

Secara global, masalah sampah mengalami tren peningkatan yang terus berlanjut. Laporan World Bank dalam *What a Waste 2.0* menyatakan bahwa produksi sampah dunia diprediksi naik dari 2,01 miliar ton pada 2016 menjadi 3,40 miliar ton pada 2050 (Kaza et al., 2018). Di tingkat nasional, Indonesia pun menghadapi tantangan yang sama, dengan mayoritas wilayah perkotaan masih mengandalkan sistem pengumpulan dan pembuangan akhir tanpa pengolahan yang memadai (Badan Pusat Statistik, 2023). Kondisi ini menggarisbawahi bahwa pengelolaan sampah bukan hanya isu lokal, melainkan masalah global yang menuntut perhatian mendalam dari berbagai pemangku kepentingan.

Kota Manado, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, memegang peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Perkembangan ini secara langsung memicu peningkatan volume sampah harian yang dihasilkan. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Manado (2023), produksi sampah di Kota Manado mencapai

sekitar 300–330 ton per hari. Sebagian besar sampah tersebut masih ditangani melalui sistem pengangkutan dan pembuangan akhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumompo, yang kini mengalami keterbatasan kapasitas akibat lonjakan volume sampah (Manenda, Mangangka, & Takaendengan, 2023). Situasi ini mencerminkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Kota Manado masih menghadapi tekanan yang signifikan.

Pemerintah Kota Manado telah merumuskan berbagai kebijakan untuk menangani permasalahan tersebut, baik lewat regulasi daerah maupun program yang berorientasi pada masyarakat. Walau begitu, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah kendala yang menghalangi efektivitas kebijakan. Rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, serta koordinasi antarinstansi yang lemah menandakan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan (Mokodompis, Pangemanan, & Londa, 2019; Renwarin, Rares, & Londa, 2015). Kondisi ini memperkuat bahwa masalah pengelolaan sampah tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga melibatkan dimensi kelembagaan dan perilaku masyarakat.

Beberapa studi sebelumnya telah meneliti pengelolaan sampah di Kota Manado, tetapi mayoritasnya masih terpusat pada aspek teknis pengelolaan dan partisipasi masyarakat. Penelitian yang secara spesifik mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan masih sangat terbatas. Selain itu, belum banyak kajian yang mengintegrasikan analisis kebijakan dengan kondisi empiris secara menyeluruh. Hal ini mengindikasikan adanya celah penelitian (research gap) yang patut dieksplorasi lebih dalam, terutama terkait faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan di Kota Manado menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan studi administrasi publik, khususnya di ranah implementasi kebijakan lingkungan. Secara praktis, hasilnya diantisipasi dapat

menjadi masukan rekomendasi bagi pemerintah daerah guna menyusun strategi kebijakan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah perkotaan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena implementasi kebijakan pengelolaan sampah, terutama dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala pelaksanaan kebijakan di lapangan. Desain deskriptif dimanfaatkan untuk menguraikan kondisi empiris secara sistematis berdasarkan data yang ada, tanpa memanipulasi variabel penelitian.

Jenis data yang diterapkan dalam studi ini adalah data sekunder. Pemilihan data sekunder didasarkan pada tujuan penelitian yang menekankan evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui dokumen resmi dan hasil riset sebelumnya yang relevan. Berdasarkan pendapat Sugiyono (2019), data sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, arsip, laporan, atau publikasi yang telah ada sebelumnya. Di sisi lain, Moleong (2017) menyatakan bahwa penggunaan data sekunder dalam penelitian kualitatif dapat membantu peneliti untuk lebih memahami fenomena sosial melalui berbagai sumber informasi yang sudah terdokumentasi. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari dokumen pemerintah daerah, laporan Badan Pusat Statistik Kota Manado, publikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan pengelolaan sampah di perkotaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni dengan mengkaji dan menganalisis berbagai dokumen relevan sesuai fokus penelitian. Dokumen yang dianalisis mencakup data volume timbulan sampah di Kota Manado, kondisi serta kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumompo, kebijakan dan regulasi pengelolaan sampah, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Data-data tersebut dijadikan fondasi untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif deskriptif, yang dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, serta menyederhanakan data relevan sesuai tujuan penelitian. Kemudian, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur untuk mempermudah pemahaman fenomena yang diteliti. Tahap terakhir melibatkan penarikan kesimpulan melalui interpretasi data berdasarkan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber berbeda, seperti dokumen pemerintah, laporan statistik, serta studi penelitian sebelumnya. Selain itu, dilakukan pula pengecekan konsistensi data guna memastikan informasi yang digunakan memiliki tingkat keandalan tinggi. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan memiliki validitas dan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai kerangka analisis utama. Model tersebut mencakup empat variabel kunci, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini dimanfaatkan sebagai instrumen analisis untuk menilai tingkat efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

## **Pembahasan**

### **Kondisi Empiris Pengelolaan Sampah di Kota Manado**

Pengelolaan sampah di Kota Manado semakin rumit akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan melonjaknya aktivitas ekonomi masyarakat. Peningkatan ini secara langsung

Memicu kenaikan volume sampah harian yang dihasilkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Manado (2023), timbulan sampah mencapai sekitar 300–330 ton per hari. Angka tersebut mencerminkan tekanan berat terhadap kapasitas sistem pengelolaan sampah yang ada. Jika dianalisis lebih dalam, peningkatan volume sampah tidak hanya disebabkan oleh jumlah penduduk, melainkan juga perubahan pola

konsumsi masyarakat yang menghasilkan lebih banyak sampah anorganik, seperti plastik dan kemasan sekali pakai. Situasi ini memperberat beban pengelolaan sampah karena sampah semacam itu membutuhkan waktu lama untuk terurai dan memerlukan teknologi khusus untuk diolah. Temuan ini selaras dengan studi Manajemen Sampah Perkotaan yang menyebutkan bahwa perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan merupakan faktor utama lonjakan timbunan sampah.

Selain itu, sistem pengelolaan sampah di Kota Manado masih bergantung pada pendekatan konvensional, yaitu kumpul–angkut–buang. Pendekatan ini menjadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai pusat utama pengelolaan sampah, tanpa pengurangan signifikan dari sumbernya. Akibatnya, terjadi ketergantungan tinggi terhadap TPA, terutama TPA Sumompo, yang kini mengalami keterbatasan kapasitas (Manenda et al., 2023). Jika kondisi ini berlanjut tanpa inovasi dalam sistem pengelolaan, risiko overkapasitas TPA akan semakin meningkat di masa depan.

Dari sisi sosial, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi masalah yang cukup akut. Masyarakat cenderung menganggap pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah sepenuhnya, sehingga kesadaran untuk memilah dan mengurangi sampah dari sumber masih minim. Situasi ini mencerminkan kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan perilaku masyarakat di lapangan. Padahal, dalam konsep pengelolaan sampah modern, keterlibatan masyarakat menjadi elemen kunci bagi keberhasilan sistem yang berkelanjutan.

Di samping itu, aspek kelembagaan juga berperan dalam kondisi pengelolaan sampah di Kota Manado. Koordinasi antarinstansi yang belum optimal serta keterbatasan kapasitas kelembagaan menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak optimal. Hal ini mengukuhkan bahwa masalah pengelolaan sampah tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga mencakup dimensi tata kelola pemerintahan (*governance*).

**Tabel 1. Kondisi Empiris Pengelolaan Sampah di Kota Manado**

No	Indikator	Kondisi Aktual	Analisis
1	Timbulan sampah	300–330 ton/hari	Tinggi dan terus meningkat
2	Sistem pengelolaan	Kumpul–angkut–buang	Belum berkelanjutan
3	Kapasitas TPA	Terbatas	Berpotensi overload
4	Partisipasi masyarakat	Rendah	Kesadaran minim
5	Pengolahan sampah	Belum optimal	Minim inovasi

Tabel 1 menggambarkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Manado masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan, baik dari sisi teknis maupun sosial. Kondisi ini selaras dengan temuan Guerrero et al. (2013) yang menyebutkan bahwa tantangan utama pengelolaan sampah di negara berkembang adalah keterbatasan infrastruktur dan minimnya partisipasi masyarakat.

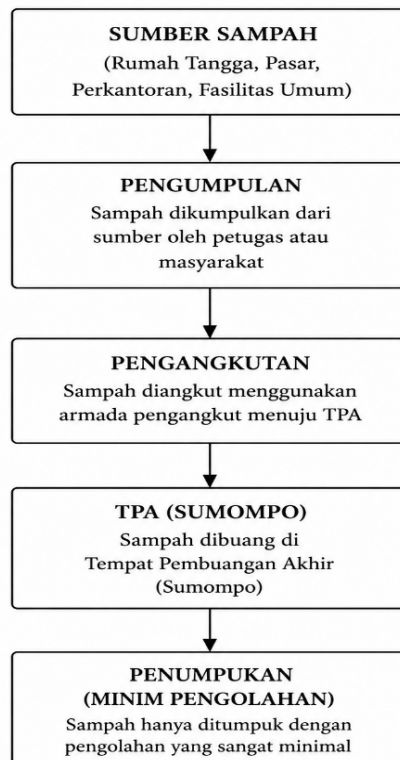


Diagram 1. Model Aktual Pengelolaan Sampah

Diagram tersebut mengilustrasikan bahwa sistem pengelolaan sampah di Kota Manado masih bersifat linier (linear system), di mana proses berakhir pada penumpukan sampah di TPA tanpa pengolahan yang memadai. Sistem ini bertolak belakang dengan prinsip Circular Economy yang menitikberatkan pada pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Dampak dari sistem linier tersebut adalah bertambahnya tekanan terhadap lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Selain itu, sistem ini juga menandakan bahwa kebijakan pengelolaan sampah sepenuhnya mengadopsi pendekatan berkelanjutan.

### **Analisis Implementasi Kebijakan (Model Edward III)**

#### **Aspek Komunikasi**

Komunikasi menjadi faktor dasar dalam implementasi kebijakan, karena menentukan tingkat pemahaman informasi kebijakan oleh pelaksana dan masyarakat sebagai target utama. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Manado, aspek komunikasi mengindikasikan bahwa penyampaian kebijakan belum optimal dan merata.

Sosialisasi kebijakan oleh pemerintah daerah masih bersifat formal dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif. Informasi mengenai pentingnya pemilahan sampah, pengurangan dari sumber, serta partisipasi masyarakat belum sepenuhnya terserap. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, terutama pada pemilahan dan pengolahan sampah rumah tangga.

Menurut George C. Edward III, komunikasi yang tidak jelas, tidak konsisten, dan tidak berkelanjutan dapat menimbulkan distorsi dalam implementasi kebijakan. Pada kasus ini, masalah komunikasi tidak hanya pada minimnya sosialisasi, melainkan juga metode yang belum disesuaikan dengan karakteristik masyarakat. Pendekatan komunikasi yang dipakai cenderung searah dan kurang mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Lebih lanjut, temuan ini selaras dengan penelitian Mokodompis et al. (2019) yang menyatakan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah akibat kurangnya edukasi berkelanjutan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa

kelemahan komunikasi kebijakan merupakan salah satu faktor utama penghambat efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado.

### **Sumber Daya**

Sumber daya merupakan elemen penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Manado. Ketersediaan sumber daya yang cukup sangat berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik dan berkelanjutan. Namun, dalam kenyataannya, pengelolaan sampah di Kota Manado masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait infrastruktur dan kemampuan lembaga. Kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumompo yang terbatas, jumlah armada pengangkut sampah yang kurang, serta sedikitnya fasilitas pengolahan modern menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, jumlah dan kualitas tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan sampah juga belum mencukupi untuk memenuhi permintaan layanan yang terus meningkat. Situasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh sumber daya yang memadai dari aspek keuangan, teknis, maupun Lembaga.

Keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah—seperti kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terbatas, kurangnya armada pengangkut, serta minimnya fasilitas pengolahan—menandakan bahwa dukungan sumber daya belum mencukupi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia berkompeten di bidang pengelolaan sampah juga menghambat pelaksanaan kebijakan.

Menurut William N. Dunn, kebijakan publik tidak akan berjalan secara efektif tanpa dukungan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk finansial, manusia, maupun infrastruktur. Hal ini juga diperkuat oleh laporan World Bank (Kaza et al., 2018) yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya merupakan permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di negara berkembang.

### **Disposisi**

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan mencerminkan tingkat komitmen dan kesiapan aparat dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam

implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado, aparat pelaksana pada dasarnya menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugasnya.

Meskipun begitu, pelaksanaan kebijakan belum optimal akibat lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi. Tanpa mekanisme kontrol yang efektif, implementasi cenderung tidak konsisten dan bergantung pada inisiatif pribadi pelaksana di lapangan.

Menurut Edward III (1980), disposisi yang baik harus didukung oleh sistem insentif dan pengawasan yang memadai. Dalam konteks ini, walaupun ada komitmen dari pelaksana, absennya sistem evaluasi berkelanjutan menyebabkan implementasi kebijakan tidak mencapai hasil optimal.

### Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi faktor penentu dalam pengorganisasian dan pelaksanaan kebijakan oleh berbagai instansi terkait. Dalam pengelolaan sampah di Kota Manado, struktur birokrasi yang ada mengalami masalah koordinasi antarinstansi. Koordinasi yang belum optimal menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak terintegrasi, sehingga menimbulkan tumpang tindih tugas dan kurangnya efektivitas implementasi. Hal ini menandakan bahwa struktur birokrasi saat ini belum mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif.

Penelitian Renwarin et al. (2015) menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pengelolaan sampah di tingkat daerah. Struktur birokrasi yang kompleks tanpa sistem koordinasi yang jelas dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan secara optimal.

**Tabel 2. Analisis Implementasi Kebijakan (Disempurnakan)**

Aspek	Kondisi	Permasalahan Inti	Analisis Kritis	Dampak
Komunikasi	Terbatas	Informasi tidak efektif	Tidak partisipatif	Partisipasi rendah
Sumber Daya	Kurang	Infrastruktur lemah	Manajemen tidak efisien	Tidak optimal
Disposisi	Ada komitmen	Pengawasan lemah	Tidak konsisten	Hasil tidak maksimal

Struktur	Kompleks	Koordinasi buruk	Ego sektoral	Tidak terintegrasi
----------	----------	------------------	--------------	--------------------

Hasil analisis pada tabel penerapan kebijakan menunjukkan bahwa keempat elemen dalam model George C. Edward III saling terkait dalam menentukan keberhasilan pengelolaan sampah di Kota Manado. Kekurangan dalam komunikasi membuat informasi kebijakan tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga partisipasi publik dalam pengelolaan sampah tetap rendah. Di sisi lain, kurangnya sumber daya semakin memperburuk pelaksanaan kebijakan karena fasilitas, infrastruktur, dan kapasitas lembaga belum mencukupi. Selain itu, sikap pelaksana yang tidak didukung oleh sistem pengawasan yang baik menyebabkan penerapan kebijakan berjalan tidak konsisten. Struktur birokrasi yang rumit dan lemahnya koordinasi antarinstansi juga menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, efektivitas penerapan kebijakan pengelolaan sampah tidak dapat tercapai jika salah satu aspek tersebut masih memiliki kelemahan.

### **Pembahasan**

Berdasarkan analisis terhadap empat aspek dalam model implementasi kebijakan George C. Edward III, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado belum optimal. Hal ini disebabkan oleh interaksi rumit antara faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang saling memengaruhi. Kelemahan komunikasi menyebabkan informasi kebijakan tidak tersalurkan secara efektif ke masyarakat, sehingga menurunkan partisipasi dalam pengelolaan sampah. Situasi ini diperburuk oleh keterbatasan sumber daya baik infrastruktur maupun kapasitas kelembagaan yang menghalangi pelaksanaan teknis kebijakan.

Di sisi lain, meski pelaksana memiliki komitmen, lemahnya pengawasan dan evaluasi membuat implementasi tidak konsisten, menandakan disposisi yang belum didukung mekanisme kontrol memadai. Selain itu, struktur birokrasi yang kurang terintegrasi memperparah masalah, khususnya dalam koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, kegagalan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado

bukan akibat satu faktor saja, melainkan akumulasi kelemahan yang saling terkait. Kondisi ini menegaskan bahwa pendekatan parsial tidak akan menyelesaikan masalah secara komprehensif.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado belum optimal. Hal ini akibat interaksi rumit antar-faktor dalam model George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi kebijakan belum efektif dan berkelanjutan, sehingga menurunkan pemahaman serta partisipasi masyarakat. Strategi komunikasi yang konvensional gagal menjangkau seluruh lapisan secara optimal. Pada sumber daya, keterbatasan infrastruktur, sarana prasarana, dan kapasitas kelembagaan menjadi hambatan utama, diperburuk oleh pengelolaan yang belum efisien.

Sementara itu, disposisi pelaksana menunjukkan komitmen dasar, tetapi lemahnya pengawasan dan evaluasi menyebabkan pelaksanaan tidak konsisten. Pada struktur birokrasi, koordinasi antarinstansi yang suboptimal menghasilkan implementasi parsial dan tidak terintegrasi, sehingga menekan efektivitas secara keseluruhan. Lebih lanjut, penelitian ini menggarisbawahi bahwa masalah implementasi bukan hanya teknis, melainkan juga menyangkut tata kelola pemerintahan dan minimnya keterlibatan masyarakat. Pendekatan sektoral atau parsial tidak lagi cukup untuk mengatasi kompleksitas permasalahan.

Karenanya, diperlukan perbaikan komprehensif dan terintegrasi, mencakup penguatan komunikasi partisipatif-adaptif, optimalisasi inovatif sumber daya, penguatan pengawasan- evaluasi berkelanjutan, serta koordinasi antarinstansi yang lebih efektif. Selain itu, transformasi paradigma dari sistem konvensional ke berbasis keberlanjutan *with active community involvement* menjadi langkah strategis. Dengan demikian, keberhasilan implementasi bergantung pada kemampuan pemerintah mengintegrasikan aspek kebijakan secara sinergis, serta mendorong kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lain untuk sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika perkotaan.

## Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kota Manado. (2023). Kota Manado dalam angka 2023. <https://manadokota.bps.go.id/publication/2023/02/28/27efc03ce34ac287612ae4de/kota-manado-dalam-angka-2023.html>
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Guerrero, L. A., Maas, G., & Hogland, W. (2013). Solid waste management challenges for cities in developing countries. *Waste Management*, 33(1), 220–232. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2012.09.008>
- Hariyadi, A. R., Aziza, P. F., Starkova, D., Ningsih, S., Setyawati, K., Yani, I., ... & Sulasih, E. S. (2025). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berkelanjutan melalui Kolaborasi Pengabdian Masyarakat Internasional Indonesia-Rusia. *SIKAMA: Sinergi Akademisi dan Masyarakat*, 3(2), 122-131.
- Kaza, S., Yao, L. C., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). *What a waste 2.0: A global snapshot of solid waste management to 2050*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0>
- Rifani, R. A., Ningtias, V. M. ., Nugroho, S. D. ., Prasojo, A. A. ., Azzahra, S. ., Syafitri, F. ., Putri, N. A. E. ., & Ardiyansah, A. (2025). Peran Bank Sampah: Efektivitas dalam Meningkatkan Pendapatan (Studi Kasus di Kota Bekasi). *ANTASENA: Governance and Innovation Journal*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.61332/antasena.v3i1.291>
- Rahayu, R. D., Pramitasari, A., & Ardiyansah, A. (2024). Collaborative governance pentahelix ABCMG+ dalam pengelolaan program bank sampah di Kota Bekasi. *REFORMASI*, 14(2), 257-270.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi: Teori, proses, dan studi kasus komparatif*. CAPS.